BAB III

UPAYA PENYELESAIAN MUTILATERAL

Setelah mengetahui kompleksnya peramasalahan konflik di wilayah Laut Cina Selatan maka juga ada upaya-upaya yang diusahakan guna menyelesaikan permasalahan ini. Upaya penyelesaian bisa dilakukan secara formal maupun informal. Banyaknya negara yang terlibat menjadikan upaya penyelesaian di tempuh melalui jalan multilateral, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian bilateral antar dua negara. Upaya multilateral dilakukan melalui forum ASEAN, hal ini dikarenakan banyaknya negara Asia Tenggara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan. Jadi sebagai organisasi Regional Asia Tenggara ASEAN memiliki peran yang penting dalam penyelesaian konflik ini.

A. Upaya Penyelesaian Multilateral

Konflik di kawasan laut Cina Selatan tidak hanya melibatkan dua pihak saja yakni Cina dan Vietnam akan tetapi juga melibatkan banyak negara-negara anggota ASEAN lainnya yaitu Filipina, Malaysia dan Brunai Darussalam. Maka sebagai organisasi perhimpunan negara-negara Asia Tenggara, ASEAN memiliki peranan penting dalam upaya penyelesaian konflik di kawasan ini. Peranan ASEAN sangat dibutuhkan untuk meminimalisir ketegangan dan pencapaian penyelesaian damai antar negara yang terlibat. Selain itu isu konflik di Laut Cina Selatan membawa dilema keamanan tersendiri bagi negara-negara kawasan Pasifik terutama Asia Tenggara dengan adanya peningkatan aktifitas militer negara-negara yang terlibat.

Ditambah lagi letak dari Laut Cina Selatan yang secara geografis berada di tengah-tengah negara-negara ASEAN. Maka tidaklah salah jika usaha-usaha penyelesaian konfllik di tempuh melalui jalan multilateral dalam forum ASEAN antara negara-negara yang terlibat konflik. Upaya multilateral yang ditempuh didasarkan pada posisi strategis Cina sebagai mitra dialog penuh ASEAN, dan mitra perdagangan bebas ASEAN dalam ACFTA. Upaya penyelesaian harus segera dicapai karena jika konflik bersenjata terjadi kembali di kawasan ini akan bisa membawa dampak bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Jika stabilitas keamanan di kawasan ini terganggun maka akan dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian dunia. Karena seperti yang diketahui Laut Cina Selatan merupakan salah satu dari jalur perdagangan utama dunia dilihat dari banyaknya kapal-kapal pasokan barang dan energi yang melewati kawasan ini setiap tahunnya. Dimana kapal-kapal dari dan menuju negara-negara yang memiliki kekuatan perekonomian tingkat dunia melewati kawasan ini, seperti kapal-kalpal Jepang, Cina, Korea Selatan dan lainnya.

Upaya penyelesaian damai pihak-pihak yang terlibat sengketa dilakukankan sesuai dengan prosedur penyelesaian damai yang disepakati dan diterapkan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menyelesaikan konflik. Dimana upaya resolusi konflik ASEAN ini disebut dengan ASEAN Way's. ASEAN Way's ini sendiri terdiri dari beberapa kunci yakni non-interfensi, informal, *minimal institutionalization*, konsultasi and konsensus, tidak mempergunakan kekuatan/militer and tanpa konfrontasi, yang mana kata kuncinya adalah konsultasi dan konsensus (musyawarah dan mufakat). Maka

upaya penyelesaian ini dilakukan dengan cara damai melalui negosiasi-negosiasi yang di bahas dalam forum ASEAN dan lokakarya Laut Cina Selatan. Salah satu konsensus yang telah disetujui antara ASEAN dan Cina dalam sengketa ini adalah DOC tentang Laut Cina Selatan yang di ratifikasi pada KTT ASEAN tahun 2004 di Kamboja.

A. Upaya Multilateral Melalui Forum ASEAN

Upaya-upaya yang diusahakan untuk penyelesaian konflik di wilayah Laut Cina Selatan ini ditempuh melalui jalur multilateral dan jalur bilateral. ASEAN dan Cina juga mulai mencari cara pemecahan masalah melalui negosiasi multilateral. Dalam forum ASEAN ini Cina adalah sebagai negara tamu yang diundang. Upaya multilateral yang ditempuh didasarkan pada posisi strategis Cina sebagai mitra dialog penuh ASEAN sejak 1996, dan mitra perdagangan bebas ASEAN dalam ACFTA. Kedua belah pihak mencoba untuk bernegosiasi melalui jalur formal misalnya melalui sidang para menteri ASEAN *(ASEAN Ministerial Meeting/AMM)*, Forum Regional ASEAN *(ASEAN Regional Forum/ARF)* dan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN *(ASEAN Summit)*. Negosiasi formal merupakan cerminan pendapat dan sikap pemerintah dan juga disebut sebagai *Track I*. Di samping negosiasi jalur pertama, dilakukankan pula mekanisme *Track II* yaitu negosiasi secara informal dimana pihak-pihak yang terlibat merupakan bukan wakil dari pemerintah.

1. ASEAN Minesterial Meeting

Setelah memulihkan hubungan diplomatik bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 1990-an, Cina kemudian mempersiapkan diri untuk memasuki negosiasi multilateral dengan ASEAN. Inisiatif pertama kali dilakukan oleh ASEAN dengan mengundang Cina sebagai tamu pada *ASEAN Miniterial Meeting* (AMM) di Kuala Lumpur Malaysia pada bulan Juli 1991. Delegasi utusan Cina pada saat itu adalah Qian Chen. Dalam pertemuan ini Chen memberi indikasi bahwa Beijing member dukungan terhadap Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) di wilayah Asia Tenggara. Maka sebagai hasil atas kesediaan Cina ini, Cina di Undang untuk hadir di AMM berikutnya di Filipina.[45]

AMM di Manila, Juni 1992 untuk pertama kalinya ASEAN mengeluarkan komunike bersama tentang masalah keamanan regional. Komunike bersama itu menyoroti masalah persengketaan di Laut Cina Selatan. Negara-negara yang terlibat pada forum ini menyatakan bahwa komunike bersama itu disebut dengan Deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan tahun 1992. Deklarasi ini menyatakan bahwa upaya penyelesaian dilakukan melalui pembicaraan multilateral dan dihimbau agar para negara yang terlibat menahan diri, meningkatkan kerjasama dan menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam TAC yang di setujui di Bali pada 1976. Prinsip dari TAC adalah melarang penggunaan kekerasan atau ancaman dalam menyelesaikan konflik serta

[45] Ign Agung Setyawan, *Komunikasi Negosiasi China Terhadap Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan*, Univ.Sebelas Maret, Surakarta,Diakses pada 24 Oktober 2012.

mengharuskan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permaalahan secara damai.[46]

Kemudian pada 29-30 Juli 1995 di pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) para menteri luar negeri mendorong para peserta sengketa untuk menegaskan kembali komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip yang relevan dalam hukum internasional maupun UNCLOS dan deklarasi ASEAN tahun 1992 tentang Laut Cina Selatan. Dalam pertemuan ini delegasi Cina langsung dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Qian Qichen tiba di Brunai, ia menegaskan bahwa Cina setuju untuk mendiskusikan sengketa secara multilateral dan siap untuk bekerjasama dengan negara yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi damai berdasarkan prinsip-pinsip hukum internasional maupun aturan-aturan lain yang relevan dalam UNCLOS 1982.

Pada pertemuan AMM yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan 20-21 Juli 1996, Laut Cina Selatan masih disebut sebagai salah satu masalah keamanan yang aktual. Para menteri ASEAN menyampaikan bahwa kawasan Asia Pasifik masih mempunyai problem aktual keamanan termasuk sengketa wilayah yang belum terselesaikan maupun klaim kedaulatan yang tumpang tindih. Dalam pertemuan tersebut juga disebutkan bahwa para menteri ASEAN setuju akan ide dibentuknya CoC (*Code of Conduct*) di kawasan Laut Cina Selatan sebagai dasar dari syarat stabilitas di kawasan ini. Setelah krisis moneter tahun 1997-1998,

[46] Willy F. semakul, *Potensi Konflik Di Laut Cina Selatan (Bagian-2)*. Forum Kajian Pertahanan Dan Maritim.

negosiasi Laut Cina Selatan diintensifkan terutama dalam menyusun kode etik tingkah lakukan.[47]

Pertemuan dalam forum AMM berlanjut pada 9 Juli 2012. Dalam forum ini para menteri ASEAN mengadakan pertemuan regional di Phnom Penh, Kamboja. Salah satu diskusi utama adalah perdamaian dan keamanan regional dan internasional di Laut Cina Selatan. Isu ini penting bagi ASEAN, karena selain Cina, empat negara ASEAN turut memperebutkan wilayah laut tersebut, yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Fokus sengketa adalah Kepulauan Paracel dan Spratly. Hingga forum ditutup pada Jumat 13 Juli 2012, tiada kesepakatan tercapai. Ini adalah kegagalan pertama ASEAN bersepakat sejak terbentuk 45 tahun lalu. Yang memperkeruh masalah, para penuntut berusaha mencari resolusi yang berbeda. Beijing bersikeras untuk menyelesaikan perselisihan secara bilateral, sementara negara-negara Asia Tenggara ingin melibatkan ASEAN dan kekuatan-kekuatan regional lain untuk meningkatkan posisi mereka terhadap Cina. Hal ini mengakibatkan kebuntuan dan mempersempit pilihan bagi penyelesaian perselisihan.

Pertikaian ini telah memecah ASEAN menjadi lebih serius, Kamboja sebagai ketua organisasi periode kini memihak Cina. Dibilang karena Kamboja mendapat tekanan dari Cina. Bahkan Filipina menganggap pertemuan ini gagal karena sikap Kamboja tersebut. Hal ini dikarenakan Kamboja menolak memasukkan insiden Beting scarborough di Laut Cina Selatan antara Cina dan

[47] Ign Agung Setyawan, *op.cid.*

Filipina, dalam agenda pertemuan tersebut.[48] Setelah Cina menolak untuk melakukan pembahasan atas insiden tersebut dalam forum AMM, Cina segera melakukan gerakan dengan mempersiapkan pembentukan garnisium militer di salah satu pulaun di kepulauan Paracel.

2. KTT ASEAN

Pada 4 November 2002 dalam KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) di tanda-tangani antara ASEAN dan Cina yang merupakan adopsi dari deklarasi ASEAN 1992. Isi dari aturan tersebut adalah membangun rasa saling percaya, meningkatkan kerjasama maritim, memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Negara-negara penandatangan diharuskan untuk mengendalikan diri dari aktivitas-aktivitas yang akan memperumit sengketa dan provokatif dan menggunakan solusi damai untuk menyelesaikan sengketa. Walaupun deklarasi ini tidak mengikat, hal ini adalah upaya maksimum yang dilakukan oleh kedua pihak untuk menyelesaikan persengketaan di Laut Cina Selatan. Disebutkan pula bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bekerja bersama secara multilateral. DOC di atas di tandatangani oleh para partisipan dengan harapan agar hal tersebut dapat menyediakan dasar-dasar untuk menjaga stabilitas kawasan dalam jangka panjang dan sebagai dasar pengertian antara para negara-negara pengklaim.

[48] Faustinus Andrea, tantangan 45 Tahun ASEAN, Jum'at 10 Agustus 2012, TEMPO.CO, Diakses pada 2 November 2012.

Pertemuan selanjutnya diadakan pada tanggal 20 Juli 2011, yang dibahas dalam pertemuan KTT ASEAN di Bali saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN. Cina, Brunai Darussalam, Malaysia, Filipina dan Vietnam, sepakat untuk menentukan panduan yang bisa membantu menyelesaikan konflik yaitu dengan menciptakan pedoman untuk implementasi dari DOC. Cina menilai hal tersebut sebagai sebuah dokumen yang bisa menjadi batu loncatan untuk melakukan kerja sama antara Cina dan ASEAN. Kesepakatan tersebut mengatur aspek hubungan seperti perlindungan biota laut, penelitian ilmiah, keamanan navigasi dan komunikasi, serta penanggulangan kejahatan trans nasional. Namun isu eksplorasi gas dan minyak bumi, masih belum terpecahkan hingga saat ini. Setelah pencapaian kesepakatan tentang formulasi of CoC tersebut, pekerjaan bersama yang harus dilakukan adalah menyusun CoC tersebut. Formulasi CoC ini tidak mengikat sehingga masih terbuka kemungkinan untuk terciptanya atau terjadinya kebuntuan dalam penyusunan CoC.

Pedoman implementasi untuk DOC diatas terdiri dari 3 paragraf mukaddimah, mukaddimah pertama mengidentifikasikan bahwa DOC adalah sebuah batu loncatan yang ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN dan Cina. Kedua, implementasi efektif dari DOC akan memberikan kontribusi terhadap lebih kuatnya kerjasama strategi antara ASEAN dan Cina. Terakhir, mukaddimah ini menyatakan bahwa pedoman ini adalah untuk mengawal implementasi akan kemungkinan kerjasama aktif, tindakan dan proyek-proyek

sebagai pelengkap dari DOC. Selain itu dalam pedoman ini terdapat 8 poin singkat yaitu[49] :

1. Implementasi DOC harus diadakan dengan pendekatan selangkah demi selangkah segaris dengan ketentuan dari DOC,
2. Para anggota DOC akan terus mempromosikan dialog dan konsultasi sesuai dengan semangat DOC,
3. Implementasi dari aktifitas-aktifitas atau proyek sebagai pelengkap atas DOC harus di identifikasi secara jelas,
4. Para partisipan dalam aktifitas atau proyekk harus diadakan berdasarkan basis sukarela,
5. Aktifitas inisial berada di bawah pengawasan DOC harus berdasarkan pada pengembangan ukuran-ukuran kepercayaan (*confidence –building measures)*,
6. Keputusan untuk tindakan implementasi konkrit atau aktifitas-aktifitas DOC harus didasarkan pada konsensus diantara para anggota, dan menunjuk pada realisasi CoC,
7. Implementasi dari proyek-proyek yang disetujui dibawah DOC, pelayanan-pelayanan dari orang-orang ulung dan unggul, jika di butuhkan, akan dicari untuk memberikan input spesifik dalam proyek-proyek yang dilaksanakan,

[49] Carlyle A. Thayer, *China-ASEAN and the South China Sea : Chinese Assertiveness and Southeast Asian Responses*, Canberra, 2011, hal: 26.

8. Laporan dari implementasi aktifitas-aktifitas dan proyek-proyek yang disetujui dibawah DOC akan dilaporkan setiap ASEAN-Cina Ministerial Meeting.

Sebelumnya atas nama ASEAN pada Agustus 1999 Manila mempresentasikan draf kode etik tingkah laku. Pada pertemuan informal tingkat tinggi di Manila pada November 1999, Cina menolak draf yang dibuat Manila, tetapi setuju untuk menggelar diskusi lebih lanjut. Ada dua hal yang kontroversial yang terkandung dalam draf kode etik tingkah laku tersebut. Pertama, apakah kode ini akan mengikat anggota secara legal ataukah hanya semacam deklarasi politik. Kedua, ketidak-setujuan tentang bagaimana cara untuk menentukan area geografis. Cina membatasi area persengketaan hanya pada Kepulauan Spratly. Sedangkam Vietnam menentang dan mengusulkan Kepulauan Paracel juga termasuk dalam kode ini. Untuk mengakomodasikan dua pandangan yang berbeda, pada 15 Maret 2000, konsultasi informal ASEAN dan Cina untuk membicarakan masalah Laut Cina Selatan diselenggarakan di In Hua Hin, Thailand. Kedua belah pihak menyepakati tiga prinsip. Pertama, sepakat untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai tanpa menggunakan sarana militer ataupun kekerasan. Kedua, kedua belah pihak setuju untuk mempelajari kemungkinan melakukan proyek bersama di kawasan ini seperti proteksi lingkungan laut, kerja sama SAR, riset kelautan, komunikasi dan navigasi yang aman dan perlawanan terhadap kriminal trans-nasional. Ketiga, setuju untuk

menggunakan prinsip-prinsip yang sudah dikenal secara universal dalam hukum internasional termasuk UNCLOS[50].

Setelah disepakatinya pedoman implementasi dari DOC menuju CoC tersebut maka penyusunan CoC bersifat krusial sekaligus strategis, karena melalui hal itu akan diatur dengan bagaimana negara-negara pengklaim bertindak di Laut Cina Selatan. Diharapkan dengan adanya CoC, tindakan-tindakan yang dikategorikan provokatif dapat dicegah sedini mungkin, sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keamanan kawasan. Mengingat bahwa penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara damai masih memerlukan waktu yang panjang, eksistensi CoC krusial bagi upaya mempertahankan status quo sekaligus menjaga stabilitas keamanan.[51]

3. ASEAN Regional Forum

Sebelumnya isu konflik Laut Cina Selatan pertama kali disebutkan secara spesifik dalam laporan ketua sidang ARF ke 2 pada bulan Agustus 1995 di Brunai Darussalam. Dinyatakan bahwa para menteri luar negeri ARF mengekspresikan keprihatinannya terhadap saling tumpang tindih kedaulatan di wilayah tersebut dan ditegaskan kembali bahwa upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui pembicaraan multilateral setelah sebelumya disepakati pada pertemuan AMM 1992 di Manila.

---

[50] Ign Agung Setyawan, *Komunikasi Negosiasi China Terhadap Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan,* univ.Sebelas Maret, Surakarta.

[51] Budi SusiloSoepandji, *Pengaruh Keamanan Regional Bagi Keamanan Nasional Indonesia (Kasus Sengketa Laut Cina Selatan).*

Pertemuan ARF selanjutnya di selenggarakan di Hanoi, 23 Juli 2010. Pada pertemuan ini Cina menolak internasionalisasi isu Laut Cina Selatan. Menteri luarnegeri Cina, Yang Jienchi menyatakan bahwa DOC telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas kawasan. Yang Jiechi mengakui adanya pertikaian teritorial dan perairan di kawasan tersebut akan tetapi persoalan tersebut tidak boleh dilihat sebagai pertikaian antara Cina dengan ASEAN, tetapi konflik bilateral antara Cina dengan negara-negara yang terlibat sengketa Laut Cina Selatan.[52] Karena bila koflik ini hanya di lihat sebagai konflik bilateral dan tidak menjadi isu Internasional maka akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Cina yang merupakan negara besar dan memiliki pengaruh serta kekuatan di kawasan Asia. Jadi Cina bisa memiliki kemampuan untuk mengatur jalannya perundingan agar dapat memenangkan sengketa tersebut.

Untuk menggalang ulang posisi ASEAN dalam sengketa di Laut Cina Selatan setelah kegagalan dengan tidak adanya komunike bersama dalam pertemuan AMM di Kamboja 2012, Indonesia segera melakukan Shuttle Diplomacy dengan beberapa negara ASEAN lainnya mengenai identifikasi prinsip-prinsip dasar Laut Cina Selatan, langkah ini dilakukan Indonesia dalam kurun waktu 36 jam. Akhirnya ada enam prinsip yang disepakati, prinsip-prinsip ini sangat mendasar namun Fundamental, pertama dukungan ASEAN terhadap DOC, kedua implementasi DOC tersebut, ketiga adalah tekat ASEAN untuk segera menyusun COC yang mengatur hubungan-hubungan negara di Laut Cina

[52] Suara Media, *China Terjerat Internasionalisasi Isu Laut Cina Selatan*, edisi 1 Agustus 2010. Diakses pada 12 November 2012.

Selatan, keempat menghormati pelaksanaan hukum Internasional atas laut, kelima penyelesaian masalah secara damai dan tidak menggunakan kekerasan dan terakhir penyelesaian persengketaan wilayah dengan UNCLOS 1982.[53] Pada 20 Juli 2012 Kamboja sebagai ketua ASEAN telah mengeluarkan hasil dari diplomasi ini secara resmi dan hal itu merupakan buah hasil dari upaya Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan di Laut Cina Selatan.

Sebagai upaya tindak lanjut dari dialog diatas ini Indonesia telah menyusun Draf Nol *Code of Conduct* (COC) yang merupakan implementasi dari DOC yang telah disepakati pada 2002 lalu. Draft Nol COC Laut Cina Selatan usulan Indonesia terdiri atas 9 pasal yang secara umum terdiri dari prinsip-prinsip dasar COC (Pasal 1), Tujuan COC (Pasal 2), dasar-dasar pelaksanaan COC (Pasal 3), wilayah pelaksanaan COC (Pasal 4), ketentuan seputar klaim-klaim teritorial di Laut Cina Selatan (Pasal 5), implementasi COC (Pasal 6), mekanisme pemantauan dan pelaporann Penerapan COC (Pasal 7), mekanisme penyelesaian sengketa (Pasal 8), ketentuan final terkait peninjauan kembali isi COC setiap lima tahun sesuai konsensus (Pasal 9).[54] Draf ini oleh Indonesia telah di sebarkan ke seluruh negara anggota ASEAN. Hal ini dimaksudkan untuk menggalang persatuan negara-negara ASEAN sebelum melakukan pertemuan kembali dengan Cina, dengan harapan agar penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan segera diselesaikan.

---

[53] BBC Indonesia Multimedia, *ASEAN Sepakat Soal Laut Cina Selatan,* 20 Juli 2012, Diakses pada 7 November 2012.

[54] Kompas.com, *Indonesia Usulkan "Code of Conduct" Laut China Selatan,* 28 September 2012. Diakses pada 5 November 2012.

Dalam Sidang Majelis Umum ke-67 Tahun 2012 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengambil tema 'Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai' ini, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan bagaimana cara ASEAN mengelola konflik di antara negara-negara yang terlibat konflik Laut Cina Selatan. ASEAN mengelola negara-negara tersebut dengan beberapa cara, yaitu:[55]

1. Negara-negara tersebut menahan diri masing-masing dengan tidak saling invasi satu sama lain. Seperti yang disampaikan oleh Presiden SBY, ASEAN memiliki peran untuk memelihara solidaritas. Solidaritas yang ingin dibangun atas dasar kesamaan geografis dan kultural regional di Asia Tenggara. Hal ini dapat mengurangi intensitas kepentingan di antara negara yang memiliki kepentingan terhadap Laut Cina Selatan.
2. Membangun kepercayaan di antara negara-negara yang memiliki konflik. Ketika terbangun rasa percaya di antara negara yang memiliki kepentingan terhadap Laut Cina Selatan, konflik yang terjadi akan terkurangi. Hal ini dapat terjadi karena tiap-tiap negara tidak saling curiga satu dengan yang lain. Sehingga, dengan melakukan pendekatan secara regional, ASEAN juga mampu menjadi jembatan komunikasi antar negara tersebut.
3. Melakukan negosiasi serius terhadap Kode Etik yang mengikat secara hukum di Laut Cina Selatan. Cara yang dilakukan ini secara tidak langsung akan mengaktifkan negara-negara yang semula terisolasi dengan

[55] Edi Nurhidayanto, *Menata Sengketa Tanpa Senjata*, 28 September 2012, Diakses pada 20 November 2012

ASEAN kemudian merasa bahwa ASEAN adalah sarana yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Ada interaksi dan hubungan timbal balik yang terjadi antara anggota ASEAN tersebut.

4. Mengembangkan budaya damai, saling toleransi dan saling memberikan apresiasi. Presiden SBY menyampaikan bahwa ASEAN akan digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi dari pihak terlibat konflik. Dengan demikian, jalur komunikasi mereka jelas.
5. Mengembangkan kerja sama regional dalam hal ekonomi. ASEAN mengikat kepada pihak yang berkepentingan kepada Laut Cina Selatan untuk saling bekerja sama dalam bidang ekonomi. Hal ini didasarkan argumentasi bahwa masyarakat yang berada di negara-negara yang terlibat tersebut pastilah perlu memenuhi kebutuhan mereka akan pangan, untuk berlindung, dan yakin akan masa depan dimana mereka memiliki peluang untuk hidup dan penghidupan.

Upaya-upaya formal diatas telah membawa beberapa kemajuan dalam upaya penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Penggunaan kekuatan militer tidak lagi digunakan demi menegaskan kedudukan masing-masing negara yang terlibat, meskipun saat ini masing-masing negara telah memiliki *land base* sendiri di kawasan ini. Dasar awal dari kesepakatan damai diantara negara-negara yag terlibat telah di tetapkan dalam DOC. Kesepakatan untuk membangun rasa saling percaya, meningkatkan kerjasama, serta memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, telah dilakukan oleh negara-negara yang terlibat sengketa.

Masing-masing negara pengkonflik berusaha menjalankan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama, namun ada kesepakatan yang isinya adalah dimana masing-masing negara diharuskan untuk mengendalikan diri dari aktivitas-aktivitas yang akan memperumit sengketa dan provokatif. Kesepakatan ini telah sempat dilanggar beberapa negara seperti Cina dan Filipina. Namun ketegangan ini masih bisa dikendalikan sehingga tidak sampai terjadi kontak senjata langsung yang bisa membawa bahaya pada situasi keamanan dan stabilitas kawasan pada tingkat yang serius.

B. Upaya Multilateral Melalui Lokakarya Laut Cina Selatan

Negosiasi informal atau biasa disebut *Track II Diplomacy* juga merupakan usaha penyelesaian sengketa, biasanya membantu negosiasi formal yang bersifat alot dan berhati-hati. Contoh *Track II Diplomacy* dalam kasus sengketa Laut Cina Selatan adalah Lokakarya Laut Cina Selatan dan Konsultasi informal ASEAN dan Cina untuk membicarakan masalah Laut Cina Selatan diselenggarakan di Thailand Maret 2000. Kedua belah pihak menyepakati tiga prinsip. Pertama, sepakat untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai tanpa menggunakan sarana militer ataupun kekerasan. Kedua, kedua belah pihak setuju untuk mempelajari kemungkinan melakukan proyek bersama di kawasan ini seperti proteksi lingkungan laut, kerja sama SAR, riset kelautan, komunikasi dan navigasi yang aman dan perlawanan terhadap kriminal trans-nasional. Ketiga,

setuju untuk menggunakan prinsip-prinsip yang sudah dikenal secara universal dalam hukum internasional termasuk UNCLOS.[56]

Upaya multilateral informal lain juga dilakukan negara-negara yang telibat sengketa di Laut Cina Selatan yaitu dengan diadakannya lokakarya Laut Cina Selatan, mengubah potensi konflik menjadi kerjasama. Menurut Hasjim Djalal, lokakarya ini mempunyai dua tujuan. Pertama, adalah mengelola konflik yang potensial dengan mencari sesuatu yang semua pihak dapat bekerja sama. Kedua, mengembangkan ukuran-ukuran kepercayaan *(confidence-building measures*/CBMs) sehingga berbagai pihak peserta sengketa dapat merasa nyaman dan kemudian dapat menciptakan atmosfir yang kondusif untuk menyelesaikan sengketa.[57] Sehingga lokakarya ini dapat mendorong diskusi dan dialog di antara negara-negara yang memiliki sengketa wilayah laut Cina Selatan dan menjajaki berbagai kemungkinan dan cara bekerjasama di bidang yang menjadi perhatian bersama. Lokakarya ini diselenggarakan atas inisiatif Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Lokakarya ini diikuti oleh seluruh anggota ASEAN yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja dan Filipina, serta dikuti oleh dua pihak luar ASEAN yang juga terlibat dalam konflik ini yaitu Cina dan Taiwan. Lokakarya Laut Cina selatan ini masih berlangsung hingga sekarang.

---

[56] Ign Agung Setyawan, *Komunikasi Negosiasi China Terhadap Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan*, univ.Sebelas Maret, Surakarta.

[57] *Ibid.*

Dalam lokakarya ini diadakan kerjasama dalam berbagai bidang yang bersifat umum, tidak sensitif dan menjadi perhatian serta kepentingan bersama, yang antara lain meliputi kerjasama dalam bidang penelitian ilmiah kelautan, oceanografi dan lingkungan laut. Berbagai Kelompok Kerja Teknis (*Technical Working Group/* TWG) dibuat untuk melakukan kerjasama dalam riset-riset yang akan dilakukan di sekitar Laut Cina Selatan. Seperti pembentukan TWG di bidang riset ilmiah kelautan, TWG proteksi lingkungan laut dan TWG keamanan pelayaran, navigasi dan komunikasi. Proposal kerjasama penelitian di bidang keragaman hayati di Laut Cina Selatan, kerjasama studi permukaan laut dan monitoring pasang naik di Laut Cina Selatan dalam konteks perubahan iklim global, serta pengembangan basis data, pertukaran informasi dan sinergi para ilmuwan merupakan salah satu bentuk dari hasil lokakarya ini.

Proses Lokakarya bergerak dari persoalan-persoalan mudah ke persoalan-persoalan rumit, dari jumlah peserta yang sedikit ke jumlah peserta yang banyak. Para peserta lokakarya juga sepakat untuk mempertahankan bentuk *informal* dan *unofficial* dari lokakarya Laut Cina Selatan karena telah terbukti dapat memberikan hasil kerjasama teknis konkrit. Bukti utama dari keberhasilan lokakarya Laut Cina Selatan adalah bahwa semenjak diadakannya lokakarya ini sejak tahun 1990 hingga sekarang, telah berhasil menciptakan kerjasama dan mencegah terjadinya konflik bersenjata langsung antara negara-negara yang terlibat sengketa.

Beberapa lokakarya yang telah di lakukan sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

LOKAKARYA LAUT CINA SELATAN

No	Tanggal	Tempat	Peserta	Hasil
1	1990	Bali	Negara-negara ASEAN	- Membangun landasan mekanisme kerja untuk lokakarya selanjutnya
2	1991	Bandung	Negara-negara ASEAN, Cina dan Taiwan	- Rekomendasi dan mengidentifikasi berbagai wilayah yang kemungkinan dapat dilakukan kerja sama. seperti proteksi lingkungan laut dan alur pelayaran yang aman.
3	1992	Yogyakarta	Negara-negara ASEAN, Cina dan Taiwan	- Kongkritisasi dan mewujudkan upaya kerjasama bersama.
4	1993	Surabaya	Negara-negara ASEAN, Cina dan Taiwan	- Identifikasi berbagai topik yang sekiranya dapat dikerjasamakan. Berbagai Kelompok Kerja Teknis (*Technical Working Group*/ TWG) dibentuk antara lain : TWG di bidang riset ilmiah kelautan, TWG penilaian sumber daya, TWG proteksi lingkungan laut, TWG persoalan hukum dan TWG keamanan pelayaran, navigasi dan komunikasi.
5	1994	Bukittinggi	Negara-negara ASEAN, Cina dan Taiwan	- Diseetujuinya proposal TWG riset ilmiah kelautan untuk dilaksanakan kerjasama penelitian di bidang keragaman hayati di Laut Cina Selatan
6	1995	Balikpapan	Negara-negara ASEAN, Cina dan Taiwan	- Disetujuinya kerjasama studi permukaan laut dan monitoring pasang naik di Laut Cina Selatan dalam konteks perubahan iklim global serta pengembangan basis data dan pertukaran informasi dan sinergi para ilmuwan
7	14 Desember 1996	Batam	Negara-negara ASEAN, Cina dan Taiwan	- Dibentuknya tiga buah usulan untuk kerjasama di penelitian keaneragaman hayati, kerjasama dalam meneliti pasang surut laut dan dampaknya, serta pertukaran informasi dan pengumpulan database berbagai bidang seperti eknomi, geografi dan geologi.
8	1 Desember 1998	Jakarta	Negara-negara ASEAN, Cina dan Taiwan	
9	01-02 Oktober 2002	Jakarta	Negara-negara ASEAN, Cina dan Taiwan	- Berkomitmen untuk melanjutkan proses Confidence Building Measures melalui rangkaian lokakarya-lokakarya selanjutnya.
10	17-18 September	Medan	Negara-negara ASEAN, Cina	- Sepakat dibentuknya "*Special Fund*"

	2003		dan Taiwan	
11	24-28 November 2004		Negara-negara ASEAN, Cina dan Taiwan	- Disepakatinya *Working Group Meeting* (WGM) *on The Study of Tides and Level Change*
12	24-26 November 2005	Banten	Negara-negara ASEAN, Cina dan Taiwan	- Kesepakatan untuk pengembangan kerjasama khususnya mengenai pengelolaan sumber daya laut dan kelautan. - Peserta lokakarya sepakat untuk mempertahankan bentuk *informal* dan *unofficial* dari lokakarya LCS ini. - Mendorong kelanjutan proses implementasi atas kegiatan-kegiatan yang telah disepakati namun belum dilaksanakan, seperti Training Program for Seafarees, Search and Rescue amd Illegal Acts at Sea Including Piracy and armed Robbery at sea, Stock Assesment, dan Training Program for Marine Ecosystem Monitoring
13	22-24 November 2007	Yogyakarta	Negara-negara ASEAN, Cina dan Taiwan	
14	28-29 November 2008	Manado	Negara-negara ASEAN, Cina dan Taiwan	- Revitalisasi lokakarya mendatang guna mendorong penciptaan program-program kerjasama baru yang lebih konkrit dan berkesinambungan melalui pembahasan agenda forum diskusi terbuka dengan tema "Cooperation in the Protection of Marine Biodiversity in the South China Sea".
15	13-14 November 2009	Makassar	Negara-negara ASEAN, Cina dan Taiwan	- Membahas *Regional Cooperation in the Field of Marine Science and Information Network in the South China Sea including Database Information Exchange and Networking Project* (China), *The Study of Tides and Sea Level Change and Their Impacts on Coastal Environment in the South China Sea* Affected by Potential Climate Change (Indonesia), *Training Program for Marine Ecosystem Monitoring* (Filipina), *Search and Rescue and Illegal Acts including Piracy and Armed Robbery* (Malaysia). adanya keingina peserta dari Cina dan Cina Taipei untuk mengajukan proyek yang merupakan proyek pelatihan dan pertukaran tenaga ahli untuk pengembangan kapasitas di bidang oceanografy, remote sensing, modelling, marine acology, fishery management, ocean science, ocen and coastal management dan marine environmental protection.
16	1 November 2010	Bandung	Negara-negara ASEAN, Cina dan Taiwan	- Peringatan 20 tahun lokakarya Laut Cina Selatan - Penyerahkan sertifikat penghargaan *"A Special Achievement Award"* kepada Prof. DR Hasyim Djalal sebagai motor "Workshop on Managing Potential Conflict" di Laut Cina Selatan.
17	9-11 November 2011	Surakarta	Negara-negara ASEAN, Cina dan Taiwan	- Laporan tentang agreed and proposed projects, asserment and future direction of the workshop. Laporan yang dibahas terkait dengan Regional Cooperation in the Field of Marine Science and Information Network in the South China Sea Includind Database Information Exchange *and Networking Project* (China), *The Study of Tides and Sea Level Change and Their Impacts on Coastal Environment in the South China Sea* Affected by Potential Climate Change (Indonesia), *Search and Rescue and Illegal Acts including Piracy and Armed Robbery* (Malaysia) dan South-East Asia Network for Education and Training/SEA-NET (merupakan proyek bersama China dan Chinese-Taipei sejak tahun 2010)

Namun demikian, usaha-usaha di atas ternyata gagal mencegah aktivitas-aktivitas provokatif yang dilakukan oleh negara-negara pengklaim. Latihan militer dan pengrusakan kapal milik negara lain ternyata tetap dilakukan oleh beberapa negara seperti Cina dan Vietnam. Yang secara nyata melanggar DOC yang dibuat pada tahun 2002 lalu, yang dimana intinya adalah kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa teritorial di kawasan ini secara damai. Fakta lain penghambat penyelesaian damai ini adalah Cina bertindak makin agresif beberapa tahun belakangan. Tahun lalu, beberapa pejabat Cina menyebut Laut Cina Selatan termasuk dalam "kepentingan inti" Cina, yang artinya negara itu siap berperang untuk membela klaimnya.[58]Apabila sudah terkait dengan masalah kepentingan, Cina sebagai negara besar akan berupaya untuk mempertahankan kepentingannya itu. Arti dari prioritas Beijing adalah menguasai wilayah Laut Cina Selatan dan tidak segan untuk mengabaikan kepentingan negara tetangga dan hukum laut internasional. Sikap dan tindakan Cina dinilai provoaktif dengan pengeluaran Undang-Undang tentang Laut Teritorial dan *Contiguous Zone* pada tanggal 25 Febuari 1992 secara de jure oleh Cina dan telah diloloskan Parlemen Cina yang memasukkan Kepulauan Spratly sebagai wilayahnya. Dan secara de facto, Cina telah menempatkan pasukan militernya untuk menjaga kepulauan tersebut untuk memperkuat pencapaian keinginannya.[59]

---

[58] Harmen Batubara, *Kekuatan di Kawasan dan Global*, 25 september, Kawasan Perbatasan.com, Diakses pada 16 November 2012.

[59] Sagita Athina Putri, *Soft Diplomacy : Sebuah Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Kepulauan Spratly Di Laut Cina Selatan*, 01 Juni 2010, Diakses pada 30 Oktober2012.

dengan kekuatan yang dihasilkan koalisi negara-negara yang lebih kecil Dalam hal ini adalah ASEAN.[60]

Perbedaan pendekatan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait ini kemudian menyulitkan proses penyelesaian sengketa. Jika masing-masing negara tetap bersikukuh terhadap pendekatan yang diajukannya, sengketa atas kepulauan Spratly ini akan terus panas, konflik dalam pengertian aksi militer bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, diperlukan mediator yang dipercaya oleh negara-negara yang bersengketa untuk menjadi penengah dan memfasilitasi pertemuan untuk mencapai titik temu yang disepakati dan dijalankan bersama secara lebih mengikat, sehingga pelanggaran terhadap kesepakatan tahun 2002 tidak terjadi lagi.

---

[60] Athanasius Aditya Nugraha, *Manufer Politik China Dalam Konflik Laut China Selatan,* Univ.Pertahanan Indonesia.